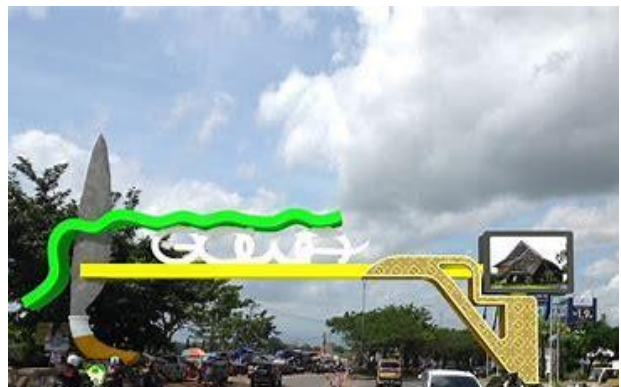




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Limpahan KaruniaNYA Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini merupakan Pertanggungjawaban Pejabat kepada masyarakat Tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran. Secara lengkap memuat Laporan yang membandingkan Perencanaan dan Hasil dari Pelaksanaan Kebijakan yang dipercayakannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Gowa.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023, Mudah-mudahan Penyajian LKjIP Dinas PUPR ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi Kinerja Organisasi selama satu Tahun agar dapat melaksanakan Kinerja ke depan secara produktif, Efektif dan Efisien, baik dari aspek Perencanaan, Pengorganisasian, manajemen keuangan maupun Koordinasi pelaksanaan.

Ungkapan Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Seluruh Pihak yang telah bekerja keras melakukam segala daya dan Upaya hingga terselesaikannya Laporan kinerja ini dan Tercapainya target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023.

Sungguminasa, 22 Maret 2024

KEPALA DINAS



IR. H. RUSDY ALIMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV-c

NIP. 19660109 199003 1 009

DAFTAR ISI

BAB.I PENDAHULUAN.....	4
I.1 LATAR BELAKANG	4
I.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
I.3 ISU STRATEGIS	15
I.4 STRATEGI ORGANISASI	16
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 TUJUAN DAN SASARAN	17
II.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
II.4 PERJANJIAN KINERJA	24
II.5 STANDAR PENILAIAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
III.2 REALISASI ANGGARAN	46
BAB IV PENUTUP.....	53
IV.1 KESIMPULAN CAPAIAN ORGANISASI	53
IV.2 LANGKAH PERBAIKAN	54

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah yang mewajibkan Penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) .

Dilandasi kesadaran yang sangat mendalam akan pentingnya Akuntabilitas yang merupakan Pertanggungjawaban Pemerintah atas Pemanfaatan Sumber daya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan kepada public maupun bagi stakeholders, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Mengungkapkan Perwujudan Akuntabilitas terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis dan sebagai Alat untuk mengukur Keberhasilan, Hambatan Pencapaian tujuan pada setiap akhir tahun anggaran.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan Gabungan dari tiga SKPD yaitu SKPD Dinas Prasarana Wilayah, SKPD Dinas Kebersihan dan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten

Gowa. Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Gowa nomor 11 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang terbentuk yang merupakan Gabungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dan SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Gowa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 46 Tahun 2016 untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Infrastruktur.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi DPUPR Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas Pokok sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi urusan Bina Marga, Cipta Karya, Teknik Dan Perencanaan, Tata Ruang, Operasi dan Pemeliharaan dan Pengairan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan rencana strategik dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dan Penataan Ruang di bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

2. Sekretaris, terdiri dari tiga Sub Bagian;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program Pelaporan dan Jasa Konstruksi
3. Sub Bagian Keuangan

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan penataan ruang dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Marga,

Bidang Binamarga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasian pelaksanaan Bina Marga merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Bina Marga.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. Bidang Cipta Karya,

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Cipta Karya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Cipta Karya;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Tata Ruang,

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang .

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang tata Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang tata Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang tata Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Operasi Pemeliharaan dan Pengairan,

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan pengairan

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Teknik dan Perencanaan,

Kepala Bidang Teknik dan Perencanaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, membantu Kepala Dinas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Teknik dan Perencanaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Teknik dan Perencanaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Teknik dan Perencanaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Teknik dan Perencanaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Teknik dan Perencanaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengairan,

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Pengairan

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengairan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengairan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengairan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengairan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari 4 UPTD Kecamatan;

1. UPTD Kecamatan Tompobulu, Biringbulu.
2. UPTD Kecamatan Bontonompo , Bajeng.
3. UPTD Kecamatan Tinggimoncong, Tombolopao.
4. UPTD Kecamatan Pallangga, Sombaopu, Bontomarannu

UPTD Pengairan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi.

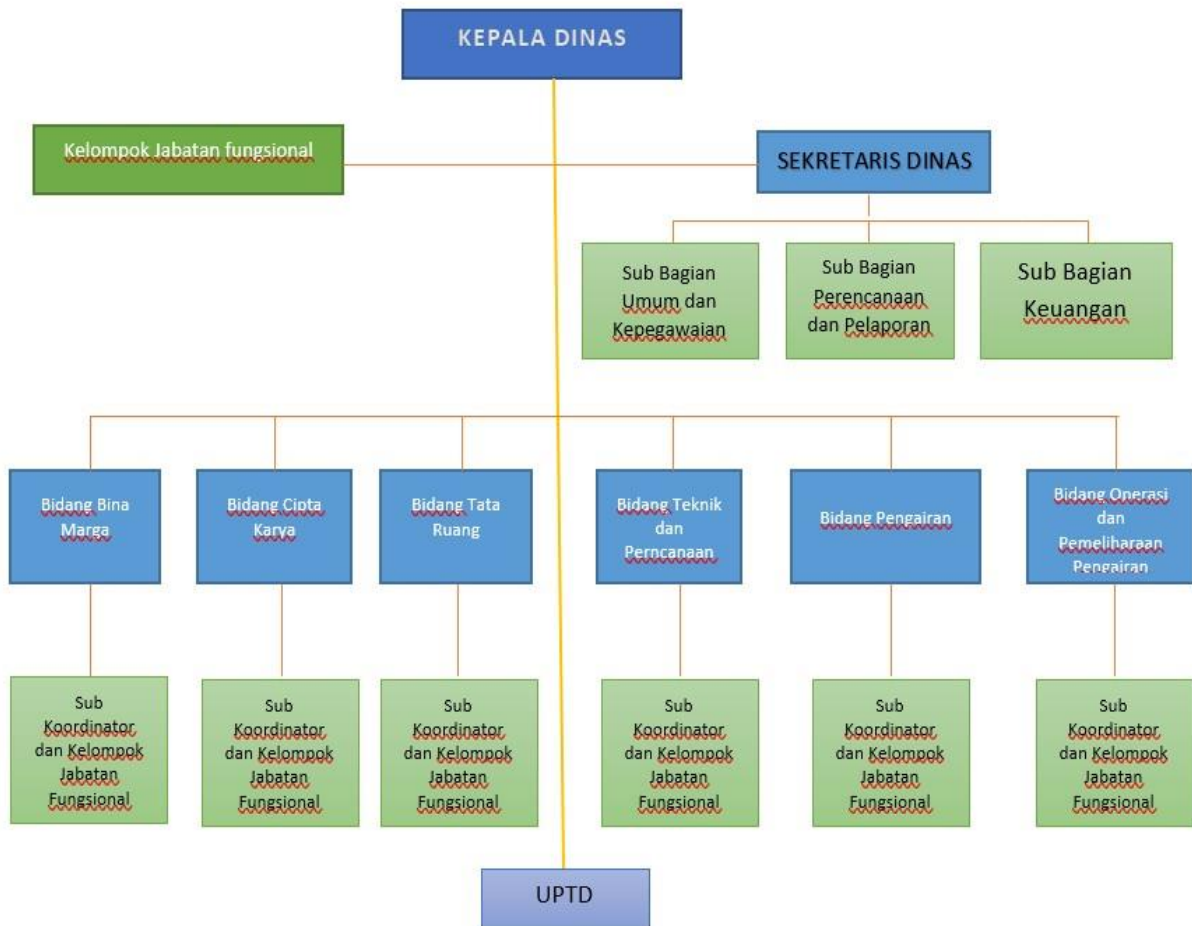
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, fungsi UPTD ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan pengairan;
- b. melakukan pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang dikerjakan secara teratur;
- c. Menyusun rencana pengairan untuk mendukung musim tanam;
- d. melakukan pembagian air irigasi secara adil dan merata;
- e. melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, untuk mengalirkan air kepetak tersier oleh juru pengairan;
- f. mengendalikan arah air guna mengantisipasi ancaman banjir terhadap areal pertanian;
- g. melakukan pengawasan terhadap jaringan dan pengairan,
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Per 31 Desember 2023 untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang terdiri atas 103 (seratus tiga) orang PNS dan 7 (tujuh) orang Non PNS. Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sejumlah 110 (seratus sepuluh) orang pegawai dengan gambaran berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:



TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JURUSAN		JUMLAH STAF (orang)	CAPAIAN (%)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TEKNIK	NON TEKNIK		
S.2	8	8	8	7	15	14,27
S.1	34	22	27	26	56	55,49
D.3	1	1	2	1	2	1,7

SMA/Sederajat	21	2	4	19	23	22,35
SD-SMP	7	0	0	0	7	6,19
Total	71	33	41	53	103	100,00

Sumber : Sekretariat Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Tahun 2022

Komposisi SDM yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan sesuai tabel di atas diketahui bahwa secara umum aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa memiliki potensi yang cukup memadai di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal tersebut ditunjukkan dari tingkat 14,27% berpendidikan S2, 55,49 % berpendidikan S1, 1,7% berpendidikan Sarjana Muda, 22,35 % berpendidikan SMA/STM dan 6,19 % berpendidikan SMP dan SD.

Gambaran SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa berdasarkan Tingkat Golongan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Gol. IV	6	3	9
2.	Gol. III	51	31	82
3.	Gol. II	11	-	11
4.	Gol. I	1	-	1
5	Non PNS	6	1	7
	Total	75	35	110

Kondisi umum sumber daya manusia aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa cukup potensial untuk mengembang tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi perubahan sistim perencanaan pembangunan daerah dengan segala implikasinya masih perlu ditingkatkan kualitasnya, peningkatan kualitas tersebut terutama melalui Diklat Teknis dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

I.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi tanah, bangunan, Mesin dan peralatan kantor, kendaraan Dinas dan perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	Satuan
1	Tanah	430.773.892.131,00	M
2	Bangunan	13.742.285.410,25	Unit
3	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Dinas bermotor	35	
	- Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	7	

Jumlah Kendaraan Dinas yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 42 (empat puluh dua) buah terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Bermotor 35 unit dan semuanya dalam keadaan baik

- Kendaraan Dinas Roda Empat 7 unit dalam Keadaan Baik

I.2.3. SUMBER DANA KEUANGAN

Sumber dana untuk melaksanakan tupoksi bersumber dari APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Tahun 2023 ,Dana DAK yang Meliputi DAK Jalan, , dan DAK Irigasi.

Rincian jumlah anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 berdasarkan

Perubahan Anggaran TA. 2023 sbb:

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	A P B D	288.071.710.298,00	253.118.996.524,00
2	Dana DAK	56.453.224.998,00	49.257.096.581,00
Jumlah		344.524.935.296,00	302.376.093.105,00

I.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelompok menjadi 5 Isu Strategis Bidang Pelayanan yang perlu di Program Penanganannya melalui Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 di antaranya adalah :

1. Pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis terutama Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan/Pemukiman (PPL) dan pemerataan interkoneksi wilayah dalam kabupaten Gowa
2. Peningkatan kinerja prasaran jaringan jalan guna mendukung mobilitas ekonomi masyarakat
3. Dukungan pembinaan penyelenggaraan jalan dari Balai Besar Jalan Nasional dan Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Provinsi dan Dinas Sumber Daya Air,Ciptakarya dan Tata Ruang Propinsi guna menyeimbangkan komposisi dan meningkatkan konektivitas jaringan jalan/Jembatan ,Irigasi, Air Bersih, Sanitasi dan drainase.
4. Penguatan pengawasan dan pembinaan dalam bidang penataan ruang untuk menjaga terjadinya alih fungsi lahan, dan penyalahgunaan serta penyimpangan Tata ruang.
5. Tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bermutu.

I.4.STRATEGI ORGANISASI

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses Penyusunan hasil kerja (Outcome) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa menggambarkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Indikator kinerja beserta Target-targetnya berdasarkan Program, kebijakan dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta berpedoman kepada Renstra Dinas PUPR Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 dan bersifat Indukatif.

II.1 TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 mengacu pada Misi, Tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Misi yang telah ditetapkan adalah;

**MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS,
TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Tujuan strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

**MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR MASYARAKAT**

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada 2 (dua) sasaran RPJMD sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

- 1. Terpenuhinya Infrastruktur Layanan publik yang terpadu dan terintegritas**
- 2. Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	target Kinerja Sasaran Lima tahun mendatang				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
[TUJUAN 1] Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistik Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan pertumbuhan ekonomi	[SASARAN 1] Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Capaian Konektivitas Jaringan Jalan yang menghubungkan Kawasan Strategis Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian Kualitas Pelayanan Infrastruktur dasar Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<p>[TUJUAN 2] Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar</p>	<p>[SASARAN 2] Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman</p>	<p>Persentase Jumlah Bangunan Yang Reprerentatif</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>
<p>TUJUAN 3] Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang Terpadu yang sinergis</p>	<p>[SASARAN 3] Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap Pelaksanaan RTRW</p>	<p>Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>
		<p>Capaian Pemamfaatan Jaringan Irigasi teknis yang telah terbangun</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>

[TUJUAN 4] Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten	[SASARAN 4] Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

II.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan Strategi pencapaian tujuan yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Adapun Strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah;

- Penguatan Konektifitas Pusat Kegiatan di kecamatan dan desa
- Peningkatan perencanaan, pengawasan/pengendalian dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur / jalan dan jembatan
- Meningkatkan Kualitas, kompetensi, dan disiplin aparat penyelenggara kegiatan jalan jembatan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tatalaksana pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan Akuntabel
- Meningkatkan Kapasitas dan kinerja penyelenggaraan kebutuhan air bersih dan sanitasi
- mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

Arah Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Wujud infrastruktur bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kabupaten gowa merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum, dan keselamatan umum seperti Jalan, Jembatan, Air bersih, Sanitasi, Bangunan gedung, Jaringan Irigasi, ruang terbuka hijau dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan yang merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan secara rutin mulai dari tahap penyiapan data sampai pelaksanaan fisik
- Meningkatkan interaksi antar wilayah pada koridor ekonomi kabupaten, provinsi dan kawasan strategis Nasional
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis kabupaten dan pemerataan jangkauan pelayanan pada Kawasan tertinggal
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparat penyelenggara jalan
- Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan air bersih dan Air Minum dan Sanitasi
- Meningkatkan kualitas pengembangan penataan bangunan dan lingkungan

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Nomor 672 Tahun 2023 Adapun indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DATA AWAL (2021)	TARGET KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,01%	95,01%	95,76%	96,51%		
		Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	95,68%	95,68%	100%	100%		
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	69,20%	69,20%	70,10%	71,10%		
		Persentase jumlah bangunan yang representatif	8%	8%	10%	14%		
		Persentase penduduk berakses air bersih	79,39%	79,39%	100%	100%		
		Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	18,77%	18,77%	54,20%	56,20%		
3	Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan rtrw	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,82%	0,82%	0,84%	0,87%		

4	Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	83,43%	83,43%	84,99%	86,55%		
---	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--

II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan Terukur dalam rentang waktu Satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Kabupaten Gowa dengan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dari Perjanjian Kinerja tersebut memuat Penetapan Kinerja. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Tahun 2023 sebagaimana tertera pada Tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
TUJUAN I					
<i>Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Sistem Jaringan Jalan Yang Mendukung Peningkatan Daya Saing dan pertumbuhan ekonomi</i>					
1	Meningkatnya kualitas Inprastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,76 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 221.592.862.443
		Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100 %		
TUJUAN II					
<i>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar</i>					
2	Meningkatnya Kualitas Inprastruktur permukiman dan pelayan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	70,10 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 2.323.203.000
		Persentase jumlah bangunan yang representatif	10 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 84.755.074.936
		Persentase penduduk berakses air bersih	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 1.301.327.960

		Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	54,2 %	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 2.348.877.312
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 100% Rp. 188.275.000 TUJUAN III <i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Terlaksananya Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Daerah yang Terpadu yang sinergis</i>					
3	meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,84 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 520.515.500
TUJUAN IV <i>Meningkatkan kualitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten</i>					
4	Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	84,99%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 16.547.057.746

II.5 STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan Suatu Proses Penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Capaian kinerja diatas mengacu pada Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain:

- Meningkatnya kualitas Inprastruktur jalan dan jembatan
- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar Permukiman
- Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW
- Meningkatnya luas areal irigasi yang berfungsi dengan baik

Metode perbandingan capaian kinerja Organisasi dilakukan dengan Menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan membandingkan antara rencana kinerja kegiatan yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Data kinerja diperoleh melalui Sistem Pengumpulan Data Kinerja dari Dua sumber yaitu Data internal dan Data Eksternal. Beberapa jenis Indikator Kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu Indikator Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar Pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan Keluaran (Output). Untuk Tahun 2023 Indikator Input ini diprioritaskan pada Penggunaan dana Kegiatan yang dilakukan untuk Pengukuran

Kinerja dengan Persentase Capaian. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan Non Fisik. Indikator Output yang digunakan bervariasi melalui output terselenggaranya Kegiatan, Jumlah laporan dan Jumlah Barang dan jasa lainnya dari Hasil Pelaksanaan Tugas dengan satuan Kegiatan, orang, Paket, Rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan Berfungsinya output Kegiatan pada Jangka Menengah. LKJIP Tahun 2023 juga menyediakan analisis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan untuk melihat strategi pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana Pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Informasi analisis dan evaluasi capaian kinerja disajikan menggunakan 7 alat analisis pendekatan yaitu (1) perbandingan antara target dan realisasi kinerja (2) perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (3) perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (4) perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan (7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan uraian sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. III.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,76%	93,80 %	98 %	Kategori Tercapai/Berhasil
	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	70,1%	66,59 %	95 %	Kategori Tercapai/Berhasil
	Persentase jumlah bangunan yang representative	10%	10%	100%	
	Persentase Penduduk berakses air bersih	100%	93,18 %	93,18 %	
	Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	54,2%	51,49 %	95 %	
meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,84%	0,82 %	97,61 %	Kategori Tercapai/Berhasil
Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	84,99%	83,25 %	97,95 %	Kategori Tercapai/Berhasil

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagian besar telah berada pada kategori Berhasil dengan Capaian sebesar 100 persen. Dengan uraian sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan dengan indikator Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan. Realisasi Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Gowa diperoleh dari survei kondisi jalan Kabupaten tahun 2023 dimana survey tersebut telah dilakukan sebelum dan setelah terlaksananya kegiatan sehingga diperoleh Target dan Realisasi proporsi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dapat dicapai sebesar 93,80 % yang diperoleh dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di tahun 2023 sebesar 1.853,99 Km ditambah panjang Jalan Kondisi Sedang sebesar 194,99 Km dibagi total panjang jalan Kabupaten sebesar 2.184,41 Km. Walaupun demikian di tahun 2023 masih ada jalan Kabupaten yang berada dalam kondisi Rusak sebesar 92,53 Km.

Capaian Indikator Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan diperoleh dari survei kondisi jembatan Kabupaten tahun 2023 dimana jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak 202 unit dari total 232 unit jembatan di kabupaten Gowa artinya masih ada sebanyak 30 unit jembatan di Kabupaten yang masih memerlukan peningkatan jembatan.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman dan Pelayanan Infrastruktur Dasar permukiman.

Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur ini di ukur dengan indikator Presentase kenaikan drainase dalam kondisi baik, Persentase jumlah bangunan yang representative, Persentase penduduk berakses air bersih dan Persentase ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman.

Indikator Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Gowa di tahun 2023 diperoleh dari panjang drainase yang mengalirkan limbah domestik dalam kondisi baik sepanjang 280,34 km dibandingkan total panjang drainase sebesar 421 km berarti masih ada drainase sepanjang 140,66 km yang masih memerlukan rehabilitasi guna mencegah banjir dan Sarana Air minum Perpipaan yang dilaksanakan untuk masyarakat agar dapat memperoleh air bersih yang layak. Indikator Persentase jumlah bangunan yang representative diperoleh dari jumlah Gedung bangunan Pemerintah Daerah yang representative digunakan sebanyak 105 unit pada Tahun 2023. Indikator Persentase Penduduk berakses air bersih sebesar 93,18 persen diperoleh dari jumlah Rumah tangga yang mempunyai akses jaringan air bersih perpipaan tahun 2023 sebanyak 166.952 Rumah tangga dibagi total Rumah tangga di Kabupaten Gowa 179.171 Rumah tangga berarti masih ada 12.219 Rumah tangga yang memerlukan layanan akses air bersih perpipaan. Indikator Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman diperoleh dari jumlah ruas jalan lingkungan sebanyak 381 ruas jalan lingkungan dibagi total jumlah kawasan permukiman sebanyak 741 kawasan.

c. Sasaran Meningkatnya Ketaatan semua Pihak terhadap Pelaksanaan RTRW

Sasaran meningkatnya ketaatan Pelaksanaan RTRW di wilayah Kabupaten Gowa dikembangkan dengan indikator Rasio Bangunan berIMB per satuan bangunan yang terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Rasio Bangunan berIMB per satuan bangunan diperoleh dari realisasi Persetujuan Bangunan gedung sampai dengan tahun 2023 sebesar 1.716 PBG dibandingkan jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Gowa sebesar 209.281 bangunan.

d.Sasaran Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang berfungsi dengan baik.

Sasaran Meningkatnya Luas areal irigasi dalam kondisi baik diperoleh dari luas areal irigasi kabupaten yang dialiri dengan baik seluas 12.766,39 dibagi luas areal persawahan total 15.335 Ha sebesar 28,42 persen.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel pengukuran sebagai berikut :

**Tabel III.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2021	REALISASI					CAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4					5				
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,01%	92.01%	93.80%				97%	98%			
	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	95,68%	95,68%	100%				100%	100%			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	69,2%	63.9%	66.59%				92%	95%			
	Persentase jumlah bangunan yang representative	8%	7.6%	10%				95%	100%			
	Persentase Penduduk berakses air bersih	79,39%	79,39%	93.18%				100%	93.18%			
	Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	18,77%	18,2%	51.42%				97%	95%			
meningkatnya	Rasio bangunan ber	0,82%	0,82%	0,82%				100%	97.61%			

ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	IMB per satuan bangunan							
Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	83,43%	83,43%	83.25%		100%	97.95%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan dengan indikator Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan. Realisasi Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Gowa diperoleh dari survei kondisi jalan Kabupaten tahun 2023 dimana survey tersebut telah dilakukan sebelum dan setelah terlaksananya kegiatan sehingga diperoleh Target dan Realisasi proporsi jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dapat dicapai sebesar 92.01 % tahun 2022 meningkat menjadi 93,80 % di tahun 2023 yang diperoleh dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di tahun 2022 sebesar 1.801,01 Km meningkat menjadi 1.853,99 Km di tahun 2023.

Capaian Indikator Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan diperoleh dari survei kondisi jembatan Kabupaten tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 pun mencapai 100% dimana jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak tahun 2022 sebesar 197 unit menjadi sebesar 202 unit di tahun 2023.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman dan Pelayanan Infrastruktur Dasar permukiman.

Indikator Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Gowa di tahun 2023 diperoleh dari panjang drainase yang mengalirkan limbah domestik dalam kondisi baik sepanjang 267,30 Km di tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 280,34 km. Indikator Persentase jumlah bangunan yang representative diperoleh dari jumlah Gedung bangunan Pemerintah Daerah yang representative digunakan sebanyak 100 unit di tahun 2022 meningkat menjadi 105 unit pada Tahun 2023. Indikator Persentase Penduduk berakses air bersih diperoleh dari jumlah Rumah tangga yang mempunyai akses jaringan air bersih perpipaan tahun 2022 sebesar 166.906 Rumah tangga menjadi 166.952 Rumah tangga di tahun 2023. Indikator Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman diperoleh dari jumlah ruas jalan lingkungan sebanyak 135 ruas jalan lingkungan di tahun 2022 menjadi 381 ruas jalan lingkungan di tahun 2023.

c. Sasaran Meningkatnya Ketaatan semua Pihak terhadap Pelaksanaan RTRW

Sasaran meningkatnya ketaatan Pelaksanaan RTRW di wilayah Kabupaten Gowa dikembangkan dengan indikator Rasio Bangunan berIMB per satuan bangunan dimana realisasi Persetujuan Bangunan gedung sampai dengan tahun tahun 2022 sebesar 6.021 PBG menjadi sebesar 6.179 PBG di tahun 2023 .

d. Sasaran Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang berfungsi dengan baik.

Sasaran Meningkatnya Luas areal irigasi dalam kondisi baik diperoleh dari luas areal irigasi kabupaten yang dialiri dengan baik seluas 12.527,16 Ha di tahun 2022 menjadi 12.766,39 Ha di tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2026)	Realisasi Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5				
1	[SASARAN 1] Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100%	95,01%	95,76 %			
2		Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100%	95,68%	100 %			
3	[SASARAN 2] Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar	Persentase Kenaikan Drainase dalam kondisi Baik	100%	69,20%	70,10 %			
4		Persentase Jumlah Bangunan Yang Reprerentatif	100%	8%	10%			
5		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	100%	79,39 %	100 %			

6	permukiman	Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman	100%	18,77%	54,20 %			
7	[SASARAN 3] Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap Pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	100%	0,82 %	0,84 %			
8	[SASARAN 4] Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	100%	83,43%	84,99 %			

Dari 4 sasaran yang dikembangkan menjadi 8 indikator kinerja hingga tahun 2023 belum ada yang melampaui target akhir Renstra 2021-2026.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standal Nasional Lainnya

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standal Nasional Lainnya disajikan sebagai berikut :

Tabel III.4
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional	
				target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
	[SASARAN 2] Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	46 SR	46 SR	100%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	15 KK	15 KK	100%

Sumber :Kategori Indeks pencapaian SPM 2023

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional hanya terdapat pada Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan kualitas Infrastruktur Permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman untuk Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, jumlah target sambungan rumah mengalami perubahan karena adanya perubahan pekerjaan di lapangan dalam masa pelaksanaan kontrak pekerjaan yaitu adanya penambahan jumlah jaringan pipa yang diperlukan , namun Realisasi tetap dapat tercapai 100%.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan

di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan dengan indikator Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dan Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan. Kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Gowa terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi. Pemenuhan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan oleh pemerintah seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat proses tersebut. Beberapa faktor penghambat utama meliputi:

- Keterbatasan Anggaran; Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memerlukan investasi yang sangat besar. Keterbatasan anggaran, baik di tingkat Pemerintah Daerah sering menjadi kendala utama dalam pembangunan dan perawatan jalan serta jembatan dimana di tahun 2023 sebagai persiapan penganggaran Pemilu yang berimplikasi pada pengurangan anggaran infrastruktur.
- Topografi dan Kondisi Geografis: Kondisi geografis yang sulit di Kabupaten Gowa yaitu daerah dataran tinggi pegunungan sebanyak 9 Kecamatan membuat pembangunan infrastruktur rawan mengalami kerusakan dan memerlukan pembiayaan yang mahal
- Potensi Bencana alam di Kabupaten Gowa yang berpotensi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Tingginya Persentase jalan yang bukan menjadi kewenangan Kabupaten Gowa dalam hal ini Jalan provinsi dan Nasional.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, serta pengawasan yang ketat untuk

memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan lancar dan tepat waktu memerlukan upaya yang harus dilakukan sebagai berikut :

- Mencari pembiayaan alternatif dalam Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selain APBD seperti pengusulan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber pembiayaan lainnya seperti pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN).
- Merancang struktur jalan dan jembatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, iklim, dan kemungkinan bencana yang mungkin terjadi. Struktur harus dirancang untuk menahan tekanan dan dampak dari bencana alam yang potensial
- Pemetaan Risiko Bencana: Perencanaan harus memperhitungkan risiko bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Ini akan membantu dalam merancang struktur jembatan yang tahan terhadap potensi bencana tersebut.
- Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait rehabilitasi jalan dan jembatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman capaian indikator sekitar 100 % sesuai yang diperjanjikan.

- a. Indikator Kinerja 1, Persentase Kenaikan Drainase dalam kondisi Baik, Faktor keberhasilan indikator ini didukung oleh Perencanaan dan pembangunan Drainase, salah satu kegiatan yang di laksanakan dalam Kota Sungguminasa adalah Pembangunan Drainase telah selesai tepat waktu sehingga indikator kinerja ini telah berhasil mencapai 100% sesuai dengan target 69,20 persen.

Beberapa kendala dan alternatif solusi yang akan dilaksanakan dalam mendukung kenaikan drainase dalam kondisi yang baik sebagai berikut :

- Keterbatasan Anggaran; Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan pembangunan drainase yang memadai dan berkelanjutan alternatif solusi yang sedang dan akan dilaksanakan adalah mengalokasikan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan dana desa. Memanfaatkan program bantuan dari lembaga internasional dan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta.
 - Kurangnya Perencanaan yang Komprehensif; Tidak adanya perencanaan yang baik sering menyebabkan sistem drainase yang dibangun tidak efisien dan kurang efektif. Alternatif Solusi: Melakukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan ahli hidrologi dan perencana kota. Menerapkan pendekatan berbasis data dan peta risiko banjir untuk merancang sistem drainase yang efektif.
 - Masalah Lahan dan Pembebasan Tanah; Kesulitan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan drainase akibat sengketa tanah atau penolakan dari pemilik tanah. Alternatif solusi yang akan dilaksanakan melakukan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Menyediakan kompensasi yang adil dan transparan bagi pemilik tanah yang terdampak.
 - Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem drainase dan partisipasi dalam pemeliharaan. Alternatif solusi yang sedang dan akan dilaksanakan: Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya drainase yang baik. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin dan pengawasan sistem drainase.
- b. Indikator Kinerja 2, persentase jumlah bangunan yang representatif, Indikator ini didukung dengan Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Gedung yang

dibangun pada Wilayah Kabupaten Gowa, Faktor keberhasilannya tidak lepas dari adanya beberapa Pembangunan Gedung yang Realisasi fisiknya mencapai 100% sehingga sangat mendukung keberhasilan Indikator tersebut mencapai 100% sesuai dengan target 10%.

- c. Indikator Kinerja 3, Persentase Penduduk Berakses Air Bersih, Indikator ini telah berhasil mencapai 100% sesuai dengan target 100%, Faktor yang mempengaruhi Indikator ini berhasil 100% krn kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan terlaksana dengan baik sesuai jadwal pelaksanaan dan didukung dengan Anggaran yang berasal dari Dana DAU.
- d. Indikator Kinerja 4, Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Permukiman, Indikator ini telah berhasil mencapai 100% sesuai dengan target 54,20%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut karena Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan yang tepat waktu.

Sasaran Strategis: Meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap Pelaksanaan RTRW capaian indikator sekitar 100 % sesuai yang diperjanjikan.

Indikator Kinerja 1, Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan, indikator ini di laksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tujuan untuk mewujudkan perumusan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dalam pemanfaatan ruang dan berhasil mencapai 100% sesuai dengan target 0,84%.

Sasaran Strategis: Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik.

- a. Indikator Kinerja 1, Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik, Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mendukung Peningkatan efektifitas dan fungsi Jaringan Irigasi di beberapa Daerah Irigasi yang tersebar di Kabupaten Gowa sehingga

dapat meningkatkan Luas areal Daerah irigasi yang terairi dan indikator kinerja ini telah berhasil mencapai 100% sesuai dengan target 84,99%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Berikut adalah Tabel atas analisa dan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa :

Tabel III.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA			ANGGARAN			%
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3			4			5
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	95,76 %	93,80%	98%	Rp 205.910.274.962	Rp 180.427.013.687	88%	111 %
	Persentase Tingkat Kemandapan Jembatan	100%	100%	100%	Rp 10.555.297.348	Rp 10.102.246.072	96%	104 %
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	70,1%	66.59%	95%	Rp 2.223.403.000	Rp 2.066.713.792	92%	103 %
	Persentase jumlah bangunan yang representatif	10%	10%	100%	Rp 84.755.074.936	Rp 76.409.627.381	90%	111 %
	Persentase Penduduk berakses air bersih	100%	93.18%	93.18%	Rp 1.301.327.960	Rp 1.099.627.960	84%	110 %
	Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan	54,2%	51,49%	95%	Rp 2.249.177.312	Rp 1.899.143.170	84%	113 %

	permukiman							
meningkatkan ketepatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,84%	0,82%	97.61%	Rp 520.515.500	Rp 509.179.300	97%	98%
Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	84,99%	83.25%	97,85%	Rp 16.547.057.746	Rp 13.496.683.924	82%	119%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 6.2.1.1.** Indikator Kinerja Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap sebagai contoh pada Program Pembangunan Jalan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 88%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran 12% dan termasuk belum efektif dalam penggunaan anggaran karena tidak mampu mencapai kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.
- 6.2.1.2.** Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan dengan capaian kinerja 100% dan Capaian anggaran 96%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 4% dan tergolong efektif dalam penggunaan anggaran.
- 6.2.1.3.** Indikator Kinerja Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik , dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 92%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran 8% akan tetapi belum efektif karena tidak mampu mencapai

kinerja sehingga perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk mencapai kinerja dengan program dan kegiatan yang selaras dengan kinerja yang diharapkan.

- 6.2.1.4.** Indikator Kinerja Persentase jumlah bangunan yang representatif, dengan capaian Kinerja 100% dan capaian anggaran 90%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran 10%, hal ini menunjukkan bahwa program yang mendukung indikator kinerja tersebut belum efektif.
- 6.2.1.5.** Indikator Kinerja Persentase Penduduk berakses air bersih dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 84%, menunjukkan bahwa Efisiensi anggaran sebesar 16% dan termasuk belum efektif.
- 6.2.1.6.** Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 84%, menunjukkan bahwa Efisiensi anggaran sebesar 16 % dan termasuk belum juga efektif dalam mendukung Indikator kinerja tersebut.
- 6.2.1.7.** Indikator Kinerja Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3% dan termasuk telah efektif dalam penggunaan anggaran.
- 6.2.1.8.** Indikator Kinerja Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 82%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 18% dan belum termasuk efektif dalam penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Berikut Tabel yang menjelaskan Analisis Program yang menunjang keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Kinerja beserta dengan Tindak Lanjut untuk kedepannya.

Tabel III.7

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM	KINERJA			RENCANA TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2			3			5
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	98%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95,76%	93.80%	98%	Terus Melakukan berbagai Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan yang inovatif sehingga dapat memenuhi capaian kinerja sesuai yang telah dijanjikan
	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	100%		100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	95%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	70.1%	66.59%	95%	Terus Melakukan berbagai Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan yang inovatif sehingga dapat memenuhi capaian kinerja sesuai yang telah dijanjikan
	Persentase jumlah bangunan yang representatif	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10%	10%	100%	
	Persentase Penduduk berakses air bersih	93,18%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100%	93.18%	93.18%	
	Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	95%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	54.2%	51.49%	95%	

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	97,61%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0.84%	0,82%	97.61%	Terus melakukan pengawasan terhadap Bangunan agar sesuai dengan kesesuaian Ruang
Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	97,95%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	84.99%	83.25%	97.95%	Terus melakukan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan dan efektifitas dna fungsi Jaringan Irigasi di beberapa D.I Kewenangan kabupaten

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Indikator 1 :

Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dengan target 95,76% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 93,80% atau tercapai 98%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN.

Indikator 2 :

Persentase tingkat kemantapan Jembatan dengan target 100% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana juga melalui PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman.

Indikator 1 :

Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik dengan target 70,10% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 66,59% atau tercapai 95%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE.

Indikator 2 :

Persentase jumlah bangunan yang representatif dengan target 10% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 10% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator 3 :

Persentase Penduduk berakses air bersih dengan target 100% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator 4 :

Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman dengan target 54,20% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 54,20% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Sasaran 3 : meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW

Indikator 1 :

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dengan target 0,87% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 0,84% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Sasaran 4 : Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik

Indikator 1 :

Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik dengan target 84,99% berhasil mencapai Realisasi Capaian sebesar 84,99% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa pada tahun 2023 melalui 4 (empat) Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kebutuhan Air bersih, Sanitasi, Drainase dan Mewujudkan Pembangunan Gedung yang berfungsi dengan baik dengan tata Bangunan Gedung dan lingkungannya.

Sasaran 3: meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Pengawasan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Sasaran 4: Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik

Upaya perbaikan di tahun berikutnya adalah Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber daya air sehingga dapat menyediakan Jaringan irigasi yang dapat berguna bagi para Petani Pemakai Air di wilayah Kabupaten Gowa.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 88% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI		
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan	Rp 205.910.274.962	Rp 180.326.713.687	88%
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 1.062.389.217	Rp 1.056.644.100	100%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 1.644.698.450	Rp 1.444.198.450	100%
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp 2.103.116.800	Rp 1.824.273.576	86%

		Pembangunan Jembatan	Rp	10.555.297.348	Rp	10.102.246.072	96%
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp	233.935.866	Rp	206.274.900	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp	841.854.560	Rp	814.154.560	96%
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp	459.473.400	Rp	285.473.400	62%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH					
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Rp	398.275.000	Rp	176.200.000	44%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp	2.223.403.000	Rp	2.066.713.792	92%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp	99.800.000	Rp	99.800.000	100%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp	84.755.074.936	Rp	76.409.627.381	90%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA					
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rp	99.700.000	Rp	99.700.000	100%
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	2.249.177.312	Rp	1.899.143.170	84%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	208.520.183	Rp	180.801.057	86%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8.426.175.169	Rp	7.805.549.591	92%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	65.829.400	Rp	0	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	59.450.347	Rp	5.565.500	9%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	215.480.000	Rp	197.392.0000	91%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	187.000.000	Rp	124.770.000	66%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	2.382.044.0000	Rp	1.836.305.918	77%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	631.536.400	Rp	508.849.200	80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	10.461.200	Rp	10.461.200	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	126.907.200	Rp	126.905.211	99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	98.014.000	Rp	97.533.000	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	66.648.000	Rp	41.921.950	62%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	225.000.0000	Rp	221.875.0000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	307.800.000	Rp	305.081.007	99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	71.500.000	Rp	65.342.000	91%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	85.500.000,00	Rp	83.250.000	97%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	50.000.000	Rp	47.250.0000	94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	66.648.000	Rp	41.921.950	62%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp	125.591.000	Rp	109.200.000	86%
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Rp	3.235.200	Rp	3.193.510	98%
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Rp	3.313.700	Rp	3.269.000	98%
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Rp	13.348.400	Rp	13.254.200	99%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 112.482.700	Rp 109.628.500	97%
	meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 182.462.200	Rp 174.183.600	96%
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Rp 48.631.700	Rp 48.437.700	99%
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 176.938.500	Rp 176.929.500	99%
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp 62.100.000	Rp 62.087.500	99%
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 901.263.746	Rp 821.790.164	91%
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 647.957.770	Rp 646.728.056	100%
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Rp 870.800	Rp.0	0%
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 11.190.185.902	Rp 9.886.888.244	88%
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1.990.911.180	Rp 731.404.322	37%

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	30.250.400	Rp	30.231.675	99%
	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp	434.926.000	Rp	274.272.540	63%
	Peningkatan Bendung Irigasi	Rp	1.105.039.300	Rp	860.235.875	78%
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp	141.130.138	Rp	140.624.938	99%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	42.422.510	Rp	42.420.610	100%

Catatan:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023, pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Sub Kegiatan " **Operasional Unit Pengelola Irigasi**" terdapat anggaran Rp. 870.800,00 dengan Realisasi Rp. 0,- disebabkan karena keterlambatan dalam melakukan pencairan dana. Namun dalam capaian indikator kinerja target Kinerja telah tercapai. Ini menunjukkan bahwa terlaksananya Efisiensi Anggaran pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV

PENUTUP

IV. A Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Akuntabilitas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban Dinas pada Tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dapat disimpulkan sesuai sasaran yaitu :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran Strategis tersebut di Kategorikan berhasil baik dalam Capaian Kinerja maupun Capaian Anggaran sesuai Target yang ditetapkan pada Renstra 2021-2026. Sasaran strategis di dukung dengan Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Sub Kegiatan yang seluruhnya tercapai **100%**. Target Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2023 yaitu 59,33 KM dan Realisasi 59,33 KM sedangkan target unit jembatan Tahun 2023 sebanyak **5 unit** dan terealisasi 5 Unit.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman

Sasaran Strategis ini dikategorikan berhasil baik dalam Capaian Kinerja maupun Capaian Anggaran. Hal ini didukung dengan beberapa indikator kinerja sasaran, program dan Sub Kegiatan yang seluruhnya tercapai 100% . Salah satunya adalah Target Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Gedung Tahun 2023 12 Unit dengan Terealisasi seluruhnya 12 Unit dan tersebar di Kabupaten Gowa.

Sasaran Strategis 3 meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW

Sasaran Strategis ini dikategorikan berhasil baik dalam Capaian Kinerja maupun Capaian Anggaran dengan di dukung terlaksananya 3 Dokumen Penataan Ruang yang telah ditetapkan dan telaksananya 12 Laporan Koordinasi dan pengendalian penataan Ruang. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Penataan ruang Kabupaten Gowa telah melaksanakan Koordinasi dan pengawasan dalam meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Luas Areal Irigasi yang Berfungsi dengan Baik.

Sasaran Strategis ini dikategorikan berhasil baik dalam Capaian Kinerja maupun Capaian Anggaran, Indikator ini terlaksana untuk Mendukung Peningkatan efektifitas dan fungsi Jaringan Irigasi di beberapa Daerah Irigasi yang tersebar di Kabupaten Gowa sehingga dapat meningkatkan Luas areal Daerah irigasi yang terairi. Salah satunya Kegiatan yang mendukung adalah Pembangunan jaringan Irigasi Permukaan yang bersumber dari Dana DAK dengan Target Panjang 7,018 KM dan terealisasi melebihi target yaitu 7,574 KM.

di setiap sasaran Strategis yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena Realisasi Capaian Sebagian besar memenuhi Target yang telah ditetapkan.

IV. B. Langkah Perbaikan Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Tahun ke tahun telah melakukan berbagai Upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan Kinerja Dinas sesuai tugas dan

ungsinya yang telah tertuang pada Renstra 2021-2026. Pada Tahun 2022 Realisasi Capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis dengan didukung Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Sebagian besar telah tercapai dengan Standar penilaian kinerja Berhasil . Namun demikian terdapat pula beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang telah mengambil Langkah Perbaikan diantaranya Meningkatkan Perencanaan, Pengawasan/ Pengendalian dan Pelaksanaan Infrastruktur baik itu Pembangunan Jalan, jembatan, Gedung dan Air minum. Selain itu Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terlatih tidak lepas dari hal yang paling penting dalam pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa yang akan datang sehingga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

KEPALA DINAS



IR. H. RUSDY ALIMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP. 19660109 199003 1 009

